

**LAPORAN SEKTOR Badan Kepegawaian Daerah Maret 2018 SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

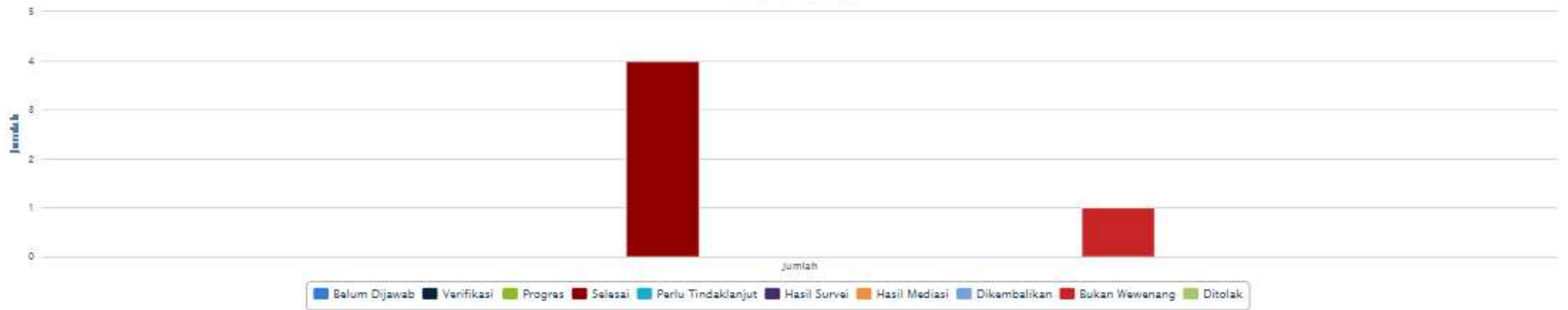
NO	NAMA	LAPORAN	WAKTU	TANGGAPAN	STATUS
16	achmad nugroho (achmaxxxxxxxx)	Ipor Pak Gup nyuwun perso niki kulo tiang alit....untuk syarat biar di angkat jadi status honor atau di akui pekerja pemprov njeh Pak gub ganjar...selain sampun ngabdi selama 6 tahun mohon penjelasan ya og banyak anak baru yang masuk padahal tidak membuka lowongan abdi atau pramu kapan buruh lepas di akui...	06-03-2018 13:08	maaf honorer sudah dilarang oleh pemerintah Pusat Secara resmi Honorer Sudah dilarang, jadi sudah tidak boleh mengangkat honorer Silahkan di tanyakan ke yang menggaji njenengan,	Laporan Selesai
17	smslaporgub (+6289xxxxxxx)	Assalamuslikum pak gub,knapa ijin perceraian sy dipersulit?? Pdhl sy sdh memenuhi persaratan nya sy sdh mau 4 th ditinggal suami pergi tanpa nafksh apapun	21-03-2018 10:02	njih di teruskan ke bidang yg nangani njih Tindak lanjut, posisi berkas di pimpinan, Pimpinan menghendaki mediasi secara langsung antara PNS yg akan mengajukan ijin cerai beserta pasangannya masing-masing, jadwal dan undangan saay ini sdh maju ke Atasan dan mengkoordinasikan waktu dengan Pimpinan demikian untuk menjadikan maklum	Laporan Selesai

18	utomo irgi (irgiuxxxxxxx)	Kepada Yth. Kepala BKD Prov. Jateng. Menurut saya finger print yg diterapkan untuk semua PNS, yg paling diuntungkan adalah PNS yg rumahnya dekat dengan lokasi kerja. Bagaimana kalo seorang PNS yg lokasi kerjanya berjarak 70 Km. dan itu membutuhkan waktu perjalanan 1.5 jam. berangkat dr rumah pukul. 05.30 sp ditempat kerja pukul 07.00 itu kalo dijalan tdk ada hambatan. Menggunakan kendaraan roda dua. bisa terjadi ban bocor, atau kecelakaan. Kalo hitungan sistem tdk dilihat dari jarak rumah ke tempat kerja, itu yg diuntungkan yg rumahnya dekat dgn tempat kerja. Imbasnya banyak PNS mengajukan mutasi kerja. Sekarang lokasi kerja sy di puncak gunung, apakah tdk mikir susahnya setengah mati. minta mutasi tidak boleh. lokasi kerja saya di SMK negeri 1 Bumijawa kab. tegal. dekat lereng gunung slamet.	27-03-2018 14:46	terimakasih laporannya diteruskan ke yang menangani Terima kasih atas masukannya. Dalam hal pelaksanaan presensi tidak ada yang diuntungkan maupun dirugikan karena presensi dilaksanakan bukan pada lokasi yang dekat dengan domisili melainkan pada lokasi kerja ataupun yang terdekat dengan lokasi kerja. Kehadiran PNS adalah merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan serta merupakan salah satu ukuran kedisiplinan PNS. Dan yang perlu diingat, sebagai PNS sejak awal telah menandatangani surat pernyataan bahwa bersedia ditempatkan di seluruh wilayah nusantara. Manakala seorang PNS ditempatkan pada suatu wilayah yang jauh dari domisili sebenarnya dapat memilih untuk mendekatkan diri pada lokasi kerja untuk memenuhi kewajibannya sebagai PNS pada unit kerja tersebut, namun apabila lebih memilih untuk menjalaninya setiap hari menempuh perjalanan jauh tersebut, maka itu berarti sudah memahami serta menerima konsekuensinya dengan berangkat jauh lebih pagi daripada yang lain untuk memenuhi kewajiban jam kerja yang telah ditetapkan. Jam kerja PNS sesuai PP 53/2010 tentang Disiplin PPNS adalah 37,5 jam dalam seminggu. Apabila semua dengan kondisi yang anda sampaikan diakomodir dengan cara mengurangi jam kerja maka jelas akan sangat jauh mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Ketika seseorang sudah bergabung dengan pemerintahan sebagai PNS maka wajib taat pada seluruh aturan yang ada, bukan kemudian meminta untuk diakomodir	Laporan Selesai
----	------------------------------	---	---------------------	--	--------------------

19	suronto (08545xxxxxxx)	PAK KEPALA BKD, MOHON PERHATIAN : STATUS PEGAWAI ESDM PROVINSI JATENG UNTUK FORMASI INSPEKTUR TAMBANG HARUS DITERTIBKAN. KENAPA ADA YANG BISA NAIK PANGKAT PADAHAL STATUSNYA ADALAH PEGAWAI KEMENTRIAN ESDM. PADAHAL INI TERKAIT ANGGARAN UNTUK PENGADAAN PEGAWAI DAN BIAYA DIKLAT ISPEKTUR. KALAU INI DISENGAJA BISA TIMBUL MASALAH DI KEMUDIAN HARI. ANDA BISA URUSAN DERNGAN KPK KARENA INI PENYALAHGUNAAN WEWENANG.	27-03-2018 18:54	terimakasih laporannya, bisa diinfokan identitasnya yg lebih jelas ke Email kami bkd@jatengprov.go.id Kalau ada yang lolos, akan ditinjau kembali, tolong sampaikan Nama/NIP ke email. bkd@jatengprov.go.id terimakasih informasinya	Laporan Selesai
20	smslaporgub (+6281xxxxxxx)	Selamat malam, saya menyampaikan kecewa. Hari ini surat permohonan untuk rumah non jabatan orang tua saya. Tidak di ACC sm Bapak Gubernur. Papa saya bekerja selama 30tahun tidak pernah korupsi dan tidak pernah merugikan negara. Rumah yang kami tempati dirawat dan dibangun. Kami ajukan permohonan untuk pengalihan rumah negara tapi tidak disetujui. Sedangkan yang lain urus bisa disetujui. Berkas papa saya lengkap tapi tidak bisa. Dengan alasan rumah masih d	28-03-2018 01:42	bukan menjadi ranah kami, itu aset	Laporan Bukan Wewenang

## Grafik Berdasarkan Status Pelaporan 2018

Source: laporgub.jatengprov.go.id



highcharts.com

No.	Status Laporan	Jumlah
1	Belum Dijawab	0
2	Verifikasi	0
3	Progres	0
4	Selesai	4
5	Perlu Tindakan lanjut	0
6	Hasil Survei	0
7	Hasil Mediasi	0
8	Dikembalikan	0
9	Bukan Wewenang	1
10	Ditolak	0
<b>Total</b>		<b>5</b>